

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan reformasi, sejak lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 tahun 2004. Daerah-daerah di Indonesia diberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hal ini berdampak tumbuhnya kreatifitas di daerah-daerah untuk mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusiannya.

Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut bukan tanpa alasan. Dilihat dari landasan yuridis, telah diamanatkan oleh Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-undang NO. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Konsekuensi dengan diberlakukannya otonomi daerah yakni pemerintah kabupaten/kota harus mampu mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam hal pembiayaan program-program pembangunan. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam

merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan essensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi di masa yang lalu.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Masalah yang terjadi di beberapa provinsi, masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena di dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang

semakin besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangga di daerah serta mengelola keuangan daerah sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada di daerah dan tidak tergantung kepada subsidi dari pemerintah pusat.

Beranjak dari kenyataan di atas, untuk dapat melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, perlu ditingkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membiayai pembangunan di daerah dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerah adalah dengan meningkatkan sumber-sumber yang menjadi kontribusi bagi pendapatan daerah.

Di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Seperti yang dikemukakan oleh Machfud Sidik, (2008). Yaitu “Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”.

Permasalahan yang selama ini sering menjadi penghambat dalam penggalan pajak daerah dan retribusi daerah adalah berkaitan dengan kualitas

sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan manajerial dalam mengelola pajak dan retribusi. Hal ini akan berdampak pada ketidakefektifan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Di sisi lain, pemberlakuan kebijakan otonomi daerah telah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mendanai aktivitas pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan sendiri. Artinya, daerah tidak lagi terlalu menggantungkan diri pada dana atau subsidi yang berasal dari pemerintah pusat, yang jumlahnya sangat terbatas bagi beberapa daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber-sumber pendapatan secara efisien dan efektif. Dalam kaitan ini, kemampuan manajerial mulai dari perencanaan, pengimplementasian, hingga pengawasan terhadap pajak dan retribusi telah menjadi faktor yang krusial dalam mendukung upaya peningkatan kemampuan daerah.

Sebelumnya telah dilakukan sebuah penelitian mengenai Retribusi Pasar. Chilvy Widiana (2009) dengan tujuan Mengetahui besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan langkah-langkah pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pasar. Retribusi Pasar Kabupaten Ponorogo disimpulkan cukup memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.

Siti Hartini, (2007), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi Retribusi Pasar Puri Baru dan untuk mengetahui besarnya kontribusi Retribusi Pasar Puri Baru terhadap retribusi pelayanan pasar tahun 2002-2006. “Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi Retribusi Pasar Puri Baru terhadap Retribusi Pelayanan Pasar selama tahun 2002-2006 adalah sebesar

52,72% dengan kriteria Sangat baik”. Begitupula di Kabupaten Toba Samosir oleh Vanc Imelda Panjaitan (2006) yang hasilnya adalah bahwa ”Penetapan Target yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Toba Samosir memberikan kontribusi yang kecil bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba Samosir”. Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti pendapatan daerah, yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Dengan demikian berdasarkan perbedaan lokasi, waktu, serta variabel-variabel untuk peningkatan pungutan Retribusi Pasar yang dipilih dalam penelitian ini, maka terdapat adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Sebagai daerah otonomi, Kabupaten Majalengka dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu komponen PAD yang menjadi andalan adalah penerimaan dari retribusi daerah, Majalengka adalah daerah otonom yang memiliki sumber-sumber yang potensial seperti; galian golongan C, pasar, parkir, hiburan, wisata, sarang walet dan sumber lainnya. Salah satu sumber yang dilihat paling potensial adalah pasar. Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam perencanaan sumber-sumber potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, telah menetapkan beberapa sumber unggulan termasuk retribusi pasar. Apabila potensi pasar dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah, maka tentunya akan memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data dari laporan keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka menyatakan bahwa target Pendapatan Daerah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 74,74% atau rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 18,69%. Dimana PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah, walaupun Kabupaten Majalengka masih memiliki potensi PAD yang terbatas, tetapi menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar menjelaskan bahwa pendapatan Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka selalu mencapai target bahkan selalu melebihi target, pencapaian target tersebut rata-rata tiap tahunnya adalah 100,07%. Namun penetapan target ini tidak ditetapkan oleh dinas Perindagpar sendiri, sehingga penetapan target tidak berdasarkan Potensi Pasar yang sesungguhnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan adanya kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya bahwa retribusi pasar Kabupaten Majalengka menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup berarti. Retribusi Pasar yang merupakan komponen dari retribusi daerah, akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah kabupaten, dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah. Apabila pemungutan Retribusi Pasar dilakukan dengan efektif oleh Dinas Pasar maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas kajian tentang Retribusi Pasar secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik, terutama dari sisi potensi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menariknya kajian ini setidaknya

dilandasi oleh dua hal, yaitu (i) berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Majalengka, selama 5 tahun terakhir penerimaan Retribusi Pasar menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan selama ini masih berada di bawah potensi penerimaan Retribusi Pasar. Dengan demikian masih adanya peluang dan kesempatan untuk ditingkatkan penerimaan Retribusi Pasar di masa yang akan datang; dan (ii) di Kabupaten Majalengka ini belum pernah diadakan penelitian secara mendalam tentang potensi Retribusi Pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti yang penting, karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi Pemda Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemilihan kabupaten ini sebagai studi kasus didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Majalengka merupakan kabupaten yang memerlukan biaya untuk pertumbuhan dan berkembang menjadi kabupaten yang maju. Disamping itu, kabupaten Majalengka memiliki potensi yang besar dan lahan yang luas untuk dijadikan sumber pendapatan bagi daerah.

Untuk menciptakan Kabupaten Majalengka yang dapat memberdayakan dan memanfaatkan fasilitas-fasilitasnya, maka penulis memandang perlu untuk meneliti sumber pendapatan daerah tersebut. Dan yang akan penulis teliti adalah salah satu dari sumber Pendapatan Asli Daerah yakni hasil Retribusi Daerah, dengan judul penelitian **“Analisis Retribusi Pasar dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Tingkat II Kabupaten Majalengka”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi penerimaan Retribusi Pasar di DT II Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2004 s.d 2008.
2. Bagaimana tingkat laju pertumbuhan Retribusi Pasar DT II Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2004 s.d 2008.
3. Bagaimana tingkat elastisitas penerimaan Retribusi Pasar di DT II Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2004 s.d 2008.
4. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pasar DT II Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2004 s.d 2008.
5. Bagaimana tingkat laju pertumbuhan PAD DT II Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2004 s.d 2008.
6. Bagaimana kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD di DT II Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2004 s.d 2008.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data, mengetahui, memperoleh gambaran hasil Pendapatan Asli Daerah DT II Kabupaten Majalengka dan menganalisis kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah DT II Kabupaten Majalengka.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis potensi penerimaan Retribusi Pasar di DT II Kabupaten Majalengka.
2. Untuk menganalisis tingkat laju pertumbuhan Retribusi Pasar DT II Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2004 s.d 2008.
3. Untuk menganalisis tingkat elastisitas penerimaan Retribusi Pasar di DT II Kabupaten Majalengka.
4. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pasar DT II Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2004 s.d 2008.
5. Untuk menganalisis tingkat laju pertumbuhan penerimaan PAD DT II Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2004 s.d 2008.
6. Untuk menganalisis kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD di DT II Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2004 s.d 2008.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang relevan dan dapat memberikan kontribusi yang terdiri dari:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu Akuntansi Publik khususnya mengenai Akuntansi Keuangan Daerah terutama bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah. Dengan memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep yang sudah ada. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai informasi atau acuan dan sekaligus untuk memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian selanjutnya

khususnya mengenai optimalisasi penerimaan yang bersumber dari Retribusi Daerah.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan menjadi bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan topik ini, yaitu bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka sebagai sumbangsih pemikiran mengenai Retribusi Pasar Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah .

